

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

## KECAMATAN MANIIS



RENCANA KERJA TAHUN 2024





## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan Rahmat-Nya kepada kita semua, karena rahmat-Nya juga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Maniis ini merupakan kelanjutan Rencana Strategis Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Dimana keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan Pembangunan di Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta yang mana dalam penyusunannya Rencana Kerja Kecamatan tetap mengacu kepada Renstra. Rencana Kerja Kecamatan sendiri akan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta. Rencana Kerja Kecamatan Maniis merupakan dasar dalam penyusunan KUA dan RKA, kemudian menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk satu tahun kedepan. Dengan demikian akan mempermudah dalam menentukan arah dan tujuan sekaligus akan mempermudah dalam menilai atau mengevaluasi tingkat pencapaiannya.

Namun demikian, sebaik apapun rencana yang dibuat perlu sekali Kerjasama semua pihak dalam melaksanakannya, baik pemerintah, swasta maupun Masyarakat. Tanpa adanya Kerjasama yang saling mendukung dari semua komponen dan elemen masyarakat, tentu akan mustahil untuk terlaksananya rencana-rencana yang telah disusun.

Untuk itu, kami berharap agar semua pihak dapat mendukung rencana ini baik dari Pemerintah Kabupaten sebagai Pembina supaya dapat memfasilitasi baik dari segi pendanaan maupun dari segi sumber daya manusia untuk selalu dapat membina Organisasi Perangkat Daerah khusus Kecamatan Maniis dalam pelaksanaan kegiatannya. Dan juga pihak swasta/pengusaha diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan dapat lebih bertanggung jawab sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal serta Masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas dan pemelihara diharapkan juga lebih berperan aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang ada.

Demikianlah Rencana Kerja Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta disusun, dengan harapan semoga Allah SWT akan memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya, semoga apa yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik hingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan.



**R. DIAN HAMDIANI HK, S.Sos., M.AP.**  
Pembina/NIP. 19670930 200502 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan, maka Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mempedomani dokumen Rencana Kerja dan Renstra Kecamatan Maniis Tahun 2024-2026, sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026. Hal ini dikarenakan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dan periode RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Maniis Tahun 2024-2026 tersebut, sebagai transisi masa kepemimpinan Kepala Daerah yang akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024.



Dokumen Renstra Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Maniis selama 3 (tiga) tahun mulai tahun 2024 – 2026. Renstra Kecamatan Maniis Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, yakni Tahap Keempat RPJPD. Sedangkan Rencana Kerja Kecamatan Maniis Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada dokumen Renstra Kecamatan Maniis Tahun 2024-2026 dan RKPD Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Maniis Tahun 2024 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah dan regulasi kebijakan nasional yang harus dilaksanakan. Selain itu Rencana Kerja juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengakomodir semua kebutuhan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan riil keuangan daerah dan regulasi kebijakan nasional yang harus dilaksanakan. Selain itu Rencana Kerja Kecamatan Maniis juga merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maniis Tahun 2024, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah. Kecamatan Maniis selaku Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Maniis secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD dan rencana resmi daerah (RPJMD dan Renstra OPD) serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004.



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini difokuskan pada Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan, Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana, Pengembangan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan, Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat, Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir (Ranhir) Renja Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan.



Rencana Kerja Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Maniis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah



- Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
  38. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
  39. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 35);



40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
41. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
42. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
43. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026;
44. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
45. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;
46. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor PR. 02. 01 / 4306 / Bappelitbangda/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Maniis Tahun 2024 yaitu untuk menyesuaikan kebijakan program dan target kinerja pembangunan daerah sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan serta untuk menyesuaikan dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, permasalahan serta isu strategis pembangunan guna mewujudkan visi, misi Kepala Daerah, serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan. Serta sebagai arah dan pedoman untuk penjabaran Visi, Misi, Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam

Renstra Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 dan sebagai acuan dalam Perencanaan dan evaluasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maniis Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniis Tahun 2024 adalah :

1. Agar dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
2. Sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Maniis Tahun 2024-2026 ke dalam rencana operasional;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Kecamatan Maniis berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan;
5. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan dan rencana program Kecamatan Maniis;
6. Memberikan instrumen dan indikator kinerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintahan daerah;
7. Sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan;
8. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Rencana Kerja Kecamatan Maniis dengan RPD Kabupaten Purwakarta;
9. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Maniis, dan penyusunan laporan lainnya;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum



- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENCANA KERJA KECAMATAN MANIIS TAHUN 2022**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Maniis Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Maniis.**

Kecamatan Maniis telah mengevaluasi Kinerja tahun 2022, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2022.

Kinerja Kecamatan Maniis tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan Kecamatan Maniis. Pada Tahun Anggaran 2022 murni mempunyai 5 Program, 12 Kegiatan dan 22 Sub kegiatan. Secara keseluruhan capaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Maniis Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 2.920.811.355,- atau 86,66% dari total anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Maniis sebesar Rp. 3.370.314.163,-. Perhitungan prosentase realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih belum mencapai target maksimal sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 sehingga belum sesuai dengan harapan sebagaimana yang telah direncanakan.

Realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan di atas dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:



**Tabel. 2.1**  
**Evaluasi Target dan Realisasi Keuangan Anggaran Tahun 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.337.200,00	0,00	4.337.200,00	0,00	4.337.200,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.635.500,00	0,00	2.635.500,00	0,00	2.635.500,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.714.600,00	0,00	4.714.600,00	0,00	4.714.600,00	100,00	0,00
	<b>TOTAL KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>11.687.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.687.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.687.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.485.296.473,00	2.097.549.347,00	0,00	0,00	2.097.549.347,00	84,40	387.747.126,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.389.500,00	0,00	4.389.500,00	0,00	4.389.500,00	100,00	0,00
	<b>TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>2.489.685.973,00</b>	<b>2.097.549.347,00</b>	<b>4.389.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101.938.847,00</b>	<b>84,43</b>	<b>387.747.126,00</b>
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.048.700,00	0,00	16.048.700,00	0,00	16.048.700,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.297.250,00	0,00	5.297.250,00	0,00	5.297.250,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.573.800,00	0,00	48.293.800,00	0,00	48.293.800,00	95,49	2.280.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	0,00	4.126.000,00	0,00	4.126.000,00	97,08	124.000,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.460.000,00	0,00	8.460.000,00	0,00	8.460.000,00	100,00	0,00
	<b>TOTAL KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>84.629.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.225.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.225.750,00</b>	<b>97,16</b>	<b>2.404.000,00</b>
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.127.800,00	0,00	0,00	154.830.000,00	154.830.000,00	99,81	297.800,00
	<b>TOTAL KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>155.127.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.830.000,00</b>	<b>154.830.000,00</b>	<b>99,81</b>	<b>297.800,00</b>

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.08	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	0,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.010.000,00	0,00	19.280.115,00	0,00	19.280.115,00	60,23	12.729.885,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	448.296.840,00	0,00	414.782.766,00	0,00	414.782.766,00	92,52	33.514.074,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	TOTAL KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	484.306.840,00	0,00	438.062.881,00	0,00	438.062.881,00	90,45	46.243.959,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.000.000,00	0,00	31.735.700,00	0,00	31.735.700,00	72,13	12.264.300,00
0.00 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.936.000,00	0,00	49.390.377,00	0,00	49.390.377,00	98,91	545.623,00
	TOTAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.319.373.663,00	2.097.549.347,00	617.491.508,00	154.830.000,00	2.869.870.855,00	86,46	449.502.808,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 2.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							
	TOTAL KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	93.936.000,00	0,00	81.126.077,00	0,00	81.126.077,00	86,36	12.809.923,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00	100,00	0,00
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 2.2.02.3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.314.050,00	0,00	3.314.050,00	0,00	3.314.050,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.985.550,00	0,00	5.985.550,00	0,00	5.985.550,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 3.2.01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT							



KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
	KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	3.314.050,00	0,00	3.314.050,00	0,00	3.314.050,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum							
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							
	TOTAL KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN	15.025.100,00	0,00	15.025.100,00	0,00	15.025.100,00	100,00	0,00
	PEMBERDAYAAN DESA							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	15.025.100,00	0,00	15.025.100,00	0,00	15.025.100,00	100,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 3.2.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							
	TOTAL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.946.650,00	0,00	4.946.650,00	0,00	4.946.650,00	100,00	0,00
	DAN KELURAHAN	19.971.750,00	0,00	19.971.750,00	0,00	19.971.750,00	100,00	0,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 5.2.01	TOTAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN	4.946.650,00	0,00	4.946.650,00	0,00	4.946.650,00	100,00	0,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 5.2.01	Penugasan Kepala Daerah							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	100,00	0,00
	TOTAL PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	100,00	0,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 6.2.01	TOTAL KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	0,00	21.762.550,00	100,00	0,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							
7.01 . 7-01.0-00.0-00.30.0.0 . 6.2.01	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	3.220.650,00	0,00	3.220.650,00	0,00	3.220.650,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.370.314.163,00</b>	<b>2.097.549.347,00</b>	<b>668.432.008,00</b>	<b>154.830.000,00</b>	<b>2.920.811.355,00</b>	<b>86,66</b>	<b>449.502.808,00</b>

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Adapun Realisasi Renstra Kecamatan Maniis Tahun 2018-2023 yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel T-C. 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Maniis Tahun 2022 berikut:



TABEL T.C - 29

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN MANIIS  
DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN MANIIS SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2022			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) Tahun 2023
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
4.01.4.01.16	Kecamatan Maniis		3.550.314.163	2.783.412.859	3.370.314.163	185.059.010	5,49%	3.675.000.000		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	3.469.610.263	2.730.495.846	3.319.373.663	2.252.791.061	79,20%	3.542.000.000		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	34.949.800	4.521.580	11.687.300	11.687.300	100%	42.000.000		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.191.500	2.141.860	4.337.200	4.337.200	100%	10.000.000		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.573.300	520.000	2.635.500	2.635.500	100%	6.000.000		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5.331.600	0	-	-	-	6.000.000		

		Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.051.600	1.859.720	4.714.600	4.714.600	100%	10.000.000		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.801.800	0	-	-	-	-		
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah yang dibayar</b>	<b>2.500.688.373</b>	<b>2.145.953.152</b>	<b>2.489.685.973</b>	<b>1.643.081.627</b>	<b>6,14%</b>	<b>2.506.000.000</b>		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.485.296.473	2.145.953.152	2.485.296.473	1.643.081.627	6,14%	2.500.000.000		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.391.900	0	4.389.500	0	0	6.000.000		
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000</b>		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	48.000.000	0	-	-	-	50.000.000		
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Komponen</b>	<b>156.207.950</b>	<b>50.228.203</b>	<b>84.629.750</b>	<b>38.531.450</b>	<b>100%</b>	<b>246.000.000</b>		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20.084.900	14.979.529	16.048.700	7.275.500	100%	25.000.000		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.021.600	3.507.788	5.297.250	1.264.100	100%	15.000.000		



7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	78.090.450	30.790.886	50.573.800	29.991.850	100%	150.000.000		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.005.000	950.000	4.250.000	0	0	6.000.000		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.006.000	0	8.460.000	0	0	50.000.000		
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Mebeles yang disediakan</b>	<b>40.346.600</b>	<b>23.568.000</b>	<b>155.127.800</b>	<b>154.830.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.000.000</b>		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40.346.600	23.568.000	155.127.800	154.830.000	100%	45.000.000		
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan</b>	<b>553.410.540</b>	<b>453.806.711</b>	<b>484.306.840</b>	<b>348.666.107</b>	<b>69,07%</b>	<b>553.000.000</b>		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000	1.690.000	4.000.000	1.200.000	100%	7.000.000		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	38.330.700	17.315.371	32.010.000	9.144.159	100%	36.000.000		
7.01.01.2.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.803.000	-	-	-	-	10.000.000		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	500.776.840	434.801.340	448.296.840	338.321.948	7,22%	500.000.000		
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit mebeles yang disediakan</b>	<b>136.007.000</b>	<b>52.418.200</b>	<b>93.936.000</b>	<b>55.994.577</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>		

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	36.000.000	4.613.200	44.000.000	15.104.200	100%	40.000.000		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100.007.000	47.805.000	49.936.000	40.890.377	100%	110.000.000		
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</b>	<b>4.832.800</b>	<b>11.776.816</b>	<b>5.985.550</b>	<b>3.314.050</b>	<b>50%</b>	<b>6.000.000</b>		
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</b>	-	<b>4.798.328</b>	<b>2.671.500</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	-		
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	4.798.328	2.671.500	0	0%	-		
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</b>	<b>4.832.800</b>	<b>6.978.488</b>	<b>3.314.050</b>	<b>3.314.050</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>		
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.832.800	6.978.488	3.314.050	3.314.050	100%	6.000.000		
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan</b>	<b>21.492.800</b>	<b>15.046.755</b>	<b>19.971.750</b>	<b>15.025.100</b>	<b>50%</b>	<b>26.000.000</b>		
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>16.976.000</b>	<b>10.038.380</b>	<b>15.025.100</b>	<b>15.025.100</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000</b>		



7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.976.000	10.038.380	15.025.100	15.025.100	100%	20.000.000		
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</b>	<b>4.516.800</b>	<b>5.008.375</b>	<b>4.946.650</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>6.000.000</b>		
7.01.03.2.03.04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4.516.800	5.008.375	4.946.650	0	0%	6.000.000		
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan</b>	<b>4.548.900</b>	<b>3.521.278</b>	<b>21.762.550</b>	<b>21.762.550</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>		
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>4.548.900</b>	<b>3.521.278</b>	<b>21.762.550</b>	<b>21.762.550</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000</b>		
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.548.900	3.521.278	21.762.550	21.762.550	100%	6.000.000		
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan</b>	<b>29.827.500</b>	<b>0</b>	<b>21.762.552</b>	<b>21.762.550</b>	<b>100%</b>	<b>22.000.000</b>		
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</b>	<b>29.827.500</b>	<b>0</b>	<b>21.762.552</b>	<b>21.762.550</b>	<b>100%</b>	<b>22.000.000</b>		

7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29.827.500	0	21.762.552	21.762.550	100%	22.000.000		
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan</b>	<b>20.001.900</b>	<b>22.572.164</b>	<b>3.220.650</b>	<b>3.220.650</b>	<b>100%</b>	<b>23.000.000</b>		
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>20.001.900</b>	<b>22.572.164</b>	<b>3.220.650</b>	<b>3.220.650</b>	<b>100%</b>	<b>23.000.000</b>		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	16.015.500	14.931.809	-	-	-	19.000.000		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.986.400	7.640.355	3.220.650	3.220.650	100%	4.000.000		



Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Kecamatan Maniis Tahun 2022 Triwulan 1 s/d Triwulan IV terhadap Capaian Kinerja RPJMD adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel. 2.2**  
**Rekapitulasi Capaian Kinerja pada Kecamatan Maniis Tahun 2022 terhadap Capaian Kinerja RPJMD**

Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPJMD Kabupaten Puwakarla pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan (2022) Tahun yang dievaluasi (PARSIAL 1)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2022 (TRIWULAN I)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2022 (TRIWULAN II)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2022 (TRIWULAN III)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd Tahun 2022 (TRIWULAN IV)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd (2022) Tahun yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2022		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja	Verifikasi Mitra Bappeda		
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp			Kinerja	Rp	Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = (11/9 x 100)	23 = (12/10 x 100)	24 = (22/8 x 100)	25 = (23/7 x 100)	26	27	28	29			
	7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Maniis			11,481,028,503	3,838,245,320		3,370,314,163	543,779,888	1,321,922,133	2,275,072,252	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	81.74	80.60	81.74	80.60	6,759,056,675	57.56	58.87	Kecamatan Maniis			
	7.01	Kecamatan			11,481,028,503	3,838,245,320		3,370,314,163	543,779,888	1,321,922,133	2,275,072,252	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	2,920,811,355	81.74	80.60	81.74	80.60	6,759,056,675	57.56	58.87	Kecamatan Maniis			
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9,870,044,393	2,756,234,356		3,319,373,663	826,764,766	1,300,362,333	2,231,749,802	2,669,670,656	2,669,670,656	2,669,670,656	2,669,670,656	2,669,670,656	2,669,670,656	2,669,670,656	2,669,670,656	2,669,670,656	85.46				6,625,105,213		66.99	Kecamatan Maniis			
			1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	B		C	B		CC		CC		CC		CC		CC		CC	85.71		CC		85.71	Kecamatan Maniis	TINGGI	ACC			
			2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	300		97.3	100		16.93		39.17		67.23		66.46		66.46		66.46	86.46		183.76		61.25	Kecamatan Maniis	RENDAH				
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	138,641,062	Baik	6,978,488	Baik	5,985,550	Baik	0	Baik	3,314,060	Baik	3,314,060	Baik	5,985,550	Baik	5,985,550	100	100	Baik		12,964,034	100	9.35	Kecamatan Maniis	SANGA T TINGGI		
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	%	240	63,703,547	100	10,038,380	80	19,971,760	78.23	15,025,100	78.23	15,025,100	78.23	15,025,100	80	19,971,760	80	19,971,760	100	100	180		30,010,130	75	55.88	Kecamatan Maniis	SEDANG		
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.04	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan	%	240	26,606,174	41.81	3,521,278	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	41.81	3,521,278	17.42	13.23	Kecamatan Maniis	SANGA T RENDAH		
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	%	240	172,894,424	0	0	80	21,762,650	0	0	0	0	80	21,762,650	80	21,762,650	80	21,762,650	100	100	80		21,762,650	33.33	12.59	Kecamatan Maniis	SANGA T RENDAH		
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	7.01.06	Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Penguasaan yang Dilaksanakan	%	153	80,324,766	30.05	7,640,356	51	3,220,660	0	0	51	3,220,660	51	3,220,660	51	3,220,660	51	3,220,660	100	100	61.05		10,861,002	62.97	13.52	Kecamatan Maniis	RENDAH		



Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Memperhatikan pencapaian kinerja atas realisasi pada pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.2 diatas, secara keseluruhan masih dikategorikan sebagai pencapaian Tinggi yaitu terealisasi sebesar Rp. 2.920.811.355,- atau 86,66% dari total anggaran murni pada Kecamatan Maniis sebesar Rp. 3.370.314.163,-. Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 adalah : **81,74** dengan Predikat / Kategori : Tinggi. Sesuai dengan Permendagri 86/2017 bahwa penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja dihitung menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI KINERJA	PREDIKAT KINERJA
1	< 50 %	SANGAT RENDAH
2	51 < 65 %	RENDAH
3	66 < 75 %	SEDANG
4	76 < 90 %	TINGGI
5	91 < 100 %	SANGAT TINGGI
6	> 100	MELAMPAUI

Capaian ini tentu saja belum sesuai target, dan perlu ditingkatkan lagi agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) SDM pelaksana kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas / kompetensi ;
- 2) **Pagu anggaran masih belum optimal;**
- 3) Waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana;
- 4) Adanya kekosongan jabatan pengelola sehingga anggaran pada kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN hanya terserap 84,40% dan ini sangat berpengaruh pada Capaian Kerja Kecamatan Maniis Tahun Anggaran 2022.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Maniis

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari Kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Fasilitasi dan Evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan usaha Milik Desa; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Maniis memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

### - **Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya (trantib).



2. Peningkatan dan pewujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW.
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling.
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundangan-undangan di seluruh desa bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau instansi terkait.
5. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa.
6. Dan melaksanakan kegiatan lainnya seperti perayaan HUT kemerdekaan RI, karnaval umum, PAM lebaran.
7. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se-Kecamatan Maniis.
8. Pembinaan aparat Kecamatan dan perangkat desa secara rutin.
9. Pelaksanaan apel pagi setiap senin dilanjutkan Briefing Staf.
10. Mengadakan rapat koordinasi Sekretaris Desa se-Kecamatan Maniis setiap hari Senin setelah pelaksanaan apel pagi.
11. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
12. Mengadakan rapat Koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat Kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di Dinas instansi di tingkat kecamatan.
13. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Maniis.
14. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa.
15. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat perdes tentang APBDes dan susunan Organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa.
16. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perangkat desa.

17. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan.
18. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

- **Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan**

1. Pembinaan dengan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, Dana Desa, Dana bagi hasil Pajak dan Sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan, dan peternakan;
3. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
4. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
5. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
7. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban, dan keindahan di wilayah Kecamatan Maniis;
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
9. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
10. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera;
11. Pembinaan dalam rangka P2WKSS;

- **Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan**

1. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
2. Pembinaan, koordinasi, dan harmonisasi lembaga-lembaga keagamaan.



3. Memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah.
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan.
5. Pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana.
6. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peran pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan.
7. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari.
8. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang dijabarkan pada program dan kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai. Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Namun demikian, sebagai gambaran pengukuran keberhasilan pelayanan kinerja dari Kecamatan Maniis yang tidak terlepas dari keberhasilan atas target yang hendak dicapai, dapat dilihat pada tabel T-C.30 berikut ini:

**TABEL T-C.30**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MANIIS**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n- 4)	Tahun 2023 (thn n- 3)	Tahun 2024 (thn n- 2)	Tahun 2025 (thn n- 1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2019 (thn n- 4)	Tahun 2020 (thn n- 3)	Tahun 2021 (thn n- 2)	Tahun 2022 (thn n- 1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran			100%	-	-	-	-	85,59%	-	-	-	-	-	Tinggi
2	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Aparatur			100%	-	-	-	-	98,62%	-	-	-	-	-	Sangat Tinggi
3	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat			100%	-	-	-	-	95,50%	-	-	-	-	-	Sangat Tinggi
4	Frekuensi Pembinaan/Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Tingkat Desa / Kelurahan			100%	-	-	-	-	89,10%	-	-	-	-	-	Tinggi
1	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi.			-	100%	-	-	-	-	92,77%	-	-	-	-	Sangat Tinggi



2	Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor									99,33%						Sangat Tinggi
3	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik									99,17%						Sangat Tinggi
4	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran									89,65%						Tinggi
5	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan									85,47%						Tinggi
6	Persentase ketersediaan data Kinerja OPD									66,54%						Sedang
7	Persentase Perencanaan, Pembinaan dan Ketersediaan Data Kinerja OPD									99,33%						Sangat Tinggi
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah					Opini : B	Opini : B	Opini : B			Opini : C	Opini : CC	Opini : B	Opini : BB		
2	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran					100%	100%	100%			97,30%	91,61%	100%	100%		
3	Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat					Kategori : Baik	Kategori : Baik	Kategori : Baik			Kategori : Baik	Kategori : Baik	Kategori : Baik	Kategori : Baik		

4	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang di laksanakan	-	-	-	-	-	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100%	
5	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	80,00%	80,00%	80,00%	0	41,81%	80,00%	100%	
6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	80,00%	80,00%	80,00%	0	0	80,00%	100%	
7	Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang di laksanakan	-	-	-	-	-	51,00%	51,00%	51,00%	30,05%	51,00%	51,00%	100%	



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Maniis**

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan di Kecamatan Maniis. Hal-hal kritis yang dimaksud adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kecamatan Maniis sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, yaitu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan Maniis sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain lingkup Kabupaten Purwakarta.

Adapun permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang dihadapi kantor Kecamatan Maniis Pada Tahun 2022 antara lain adalah

1. Kurangnya sumber daya manusia dalam bidang sesuai Tupoksi;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mempunyai kondisi baik untuk menunjang kegiatan-kegiatan fasilitasi dan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan;
3. Kurangnya sumber daya manusia yang mengerti IT;
4. Belum tersedianya sarana yang memadai untuk melakukan penyimpanan arsip;
5. Jumlah kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
6. Masih lemahnya Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak melaksanakan hasil koordinasi;
7. Pola pembinaan aparat yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja;
8. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Maniis, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati Purwakarta kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Purwakarta.
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat di kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomis masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pelayan Prima Kecamatan Maniis sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki



persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

- 5) Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, asset pertanahan dan keamanan wilayah.

Isu Strategis dapat diukur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta yang berkaitan dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pada Kecamatan Maniis diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 antara lain:

1. Unsur Perencanaan

- a. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan PD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
- b. Belum optimalnya pelibatan stakeholder nonpemerintah dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
- c. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- d. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- e. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
- f. Penggunaan aplikasi SIPD perencanaan masih belum optimal dari segi fitur maupun SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;

2. Unsur Keuangan
  - a. Penggunaan aplikasi SIPD keuangan masih belum optimal dari segi SDM yang mengelolanya di masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. Masih belum optimalnya pengelolaan administrasi Asset Daerah;
3. Unsur Kepegawaian
  - a. Masih rendahnya ASN struktural yang mengikuti kegiatan assessment;
  - b. Kurangnya alokasi formasi untuk pemenuhan kebutuhan pegawai;
4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan  
Masih rendahnya peningkatan SDM ASN melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Unsur Kewilayahan  
Belum optimalnya tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat desa;

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kerja Kecamatan Maniis disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis serta mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai amanat undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (PPAS).

RKPD Kabupaten Purwakarta disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.



Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah, Kecamatan Maniis, mengelola anggaran sebagai berikut:

1. Tahun 2019 anggaran sebesar Rp.3.135.998.413,- terealisasi sebesar Rp.3.048.145.065,- atau 97,20% melalui pelaksanaan 4 program dan 28 kegiatan;
2. Tahun 2020 anggaran sebesar Rp.3.127.697.008,- terealisasi sebesar Rp.2.846.112.263,- atau 85,26% melalui pelaksanaan 2 program dan 27 kegiatan;
3. Tahun 2021 anggaran sebesar Rp.3.050.813.101,- terealisasi sebesar Rp.2.783.412.859,- atau 91,23% melalui pelaksanaan 5 program, 12 kegiatan dan 25 sub. kegiatan.
4. Tahun 2022 anggaran sebesar Rp.3.370.314.163,- terealisasi sebesar Rp.2.920.811.355,- atau 86,66% melalui pelaksanaan 5 program, 12 kegiatan dan 22 sub. kegiatan.
5. Tahun 2023 anggaran sebesar Rp.3.550.314.163,- yang terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 27 sub. kegiatan.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Maniis diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Dalam RKPD 2024 Kecamatan Maniis mengusulkan 6 program dengan 16 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.485.424.995 ,-.

Rancangan awal RKPD Kecamatan Maniis Tahun 2024 dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel T-C. 31 berikut :

**TABEL T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024**  
**KECAMATAN MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA**

**KECAMATAN MANIIS**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7					3.485.424.995	UNSUR KEWILAYAHAN				3.485.424.995	
7	01				3.485.424.995	KECAMATAN				3.485.424.995	
7	01	01			3.378.324.995	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Opini B; Persentase 100%	3.378.324.995	
7	01	01	2	01	26.900.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen yang Disusun	Dokumen	26.900.000	
7	01	01	2	01	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	6.000.000	
7	01	01	2	01	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.500.000	
7	01	01	2	01	5.400.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.400.000	



7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan PA-SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	6.000.000	
7	01	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah yang dibayar</b>	<b>Orang/Bulan</b>	<b>2.494.796.473</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah yang dibayar</b>	<b>Orang/Bulan</b>	<b>2.494.796.473</b>	
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maniis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang / 14 Bulan	2.489.296.473	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maniis	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang / 14 Bulan	2.489.296.473	
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.500.000	
7	01	01	2	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun</b>	<b>Laporan</b>	<b>4.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun</b>	<b>Laporan</b>	<b>4.000.000</b>	
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.000.000	

7	01	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat</b>	<b>Paket</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat</b>	<b>Paket</b>	<b>25.000.000</b>
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	15.000.000
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Maniis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Maniis	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	10.000.000
7	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Komponen</b>	<b>Item/Paket</b>	<b>164.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Paket Komponen</b>	<b>Item/Paket</b>	<b>164.000.000</b>
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.000.000
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	107.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	107.000.000
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Item	5.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Maniis	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Item	5.000.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	10.000.000



7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Disusun	1 Dokumen	5.000.000	
7	01	01	2	07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Unit Mebeler yang disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>70.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Unit Mebeler yang disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>70.000.000</b>	
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Maniis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Maniis	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30.000.000	
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Maniis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	20.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Maniis	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	20.000.000	
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Maniis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Maniis	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20.000.000	
7	01	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Bulan</b>	<b>Bulan/ Laporan</b>	<b>495.628.522</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Bulan</b>	<b>Bulan/ Laporan</b>	<b>495.628.522</b>	
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.500.000	
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.500.000	
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	442.628.522	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 Laporan	442.628.522	

7	01	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah unit mebeul yang disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>98.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah unit mebeul yang disediakan</b>	<b>Unit</b>	<b>98.000.000</b>	
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Maniis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	30.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Maniis	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	30.000.000	
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Maniis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Bangunan lainnya atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	18.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Maniis	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Bangunan lainnya atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	18.000.000	
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Maniis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Maniis	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Kategori : Baik</b>	<b>7.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		<b>Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Kategori : Baik</b>	<b>7.000.000</b>	
7	01	02	2	01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Dokumen</i>	<b>3.000.000</b>	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Dokumen</i>	<b>3.000.000</b>	
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan/ Dokumen	<b>3.000.000</b>	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Laporan/ Dokumen	<b>3.000.000</b>	



7	01	02	2	02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>		<i>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Dokumen</i>	<i>4.000.000</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>		<i>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Dokumen</i>	<i>4.000.000</i>
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan/ Dokumen	4.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan/ Dokumen	4.000.000
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>37.600.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>37.600.000</b>
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Lembaga</i>	<i>25.000.000</i>	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Lembaga</i>	<i>25.000.000</i>
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Maniis	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Maniis	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga	25.000.000
7	01	03	2	03		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>4.600.000</i>	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>4.600.000</i>
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	4.600.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	4.600.000
7	01	03	2	06		<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan</i>	<i>Keluarga</i>	<i>8.000.000</i>	<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>		<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan</i>	<i>Keluarga</i>	<i>8.000.000</i>
7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian	Kecamatan Maniis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	50 Keluarga	4.000.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan	Kecamatan Maniis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan	50 Keluarga	4.000.000

						Lingkungan Hidup		Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			Hidup		Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Maniis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	4.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Maniis	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	4.000.000
7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>7.500.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>7.500.000</b>
7	01	04	2	01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>7.500.000</i>	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>		<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>7.500.000</i>
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	3.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	3.000.000
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	4.500.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	4.500.000
7	01	05				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>



7	01	05	2	01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</b>	<b>Dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>		<b>Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</b>	<b>Dokumen</b>	<b>25.000.000</b>
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Maniis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	25.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Maniis	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	25.000.000
7	01	06				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>
7	01	06	2	01		<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>Kegiatan/ Dokumen</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</b>		<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>	<b>Kegiatan/ Dokumen</b>	<b>30.000.000</b>
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	15.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dokumen	15.000.000
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Maniis	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5.000.000

7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Maniis	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	10.000.000	
---	----	----	---	----	----	--	---------------------	--	-----------	------------	--	---------------------	--	-----------	------------	--



## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Maniis juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian untuk tahun 2024 tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kecamatan Maniis selaku organisasi Perangkat Daerah.

**Tabel T-C.32**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Jalan Kabupaten / Pemda Desa Tegaldatar		Rp. 700.000.000	
2	Lingkungan Hidup	Desa Tegaldatar		Rp. 250.000.000	
3	Pariwisata	Wilayah Rw. 01 dan Rw. 07 Desa Tegaldatar		Rp. 1.000.000.000	
4	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Tegaldatar Rt. 008 / 003 Desa Tegaldatar		Rp. 500.000.000	
5	Pertanian	Kp. Tegaldatar Rt. 002 - 012 dan Rw. 02, 04		Rp. 952.000.000	
6	Pertanian	Kp. Tegaldatar Rt. 008, 009, 010 / 003 Desa Tegaldatar		Rp. 204.000.000	
7	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Desa Tegaldatar		Rp. 200.000.000	
8	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Sampih Rt. 05/02 s/d Rt. 12/03		Rp. 850.000.000	
9	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Sampih Rt. 03/01 Desa Cijati		Rp. 250.000.000	
10	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Desa Cijati		Rp. 50.000.000	
11	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Cijati Rt. 09/03 s/d Rt. 05/02		Rp. 650.000.000	
12	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Cilegong		Rp. 100.000.000	
13	Peternakan	Menyeluruh Desa Cilegong		Rp. 250.000.000	
14	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Pasannggrahan Rw. 01 dan Kp. Gunungkarung Rw. 02		Rp. 500.000.000	
15	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Cipeuteuy Rw. 02		Rp. 1.080.000.000	
16	Dinas Pendidikan	Kp. Cilegong Utara Rt. 05/01 Desa Maniis		Rp. 1.476.000.000	



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
17	Dinas Kesehatan	Kp. Cilegong Utara Rt. 05/01 Desa Maniis		Rp. 50.000.000	
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Desa Sukamukti		Rp. 1.000.000.000	
19	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian	Desa Sukamukti		Rp. 100.000.000	
20	Pemerintahan	Desa PasirJambu		Rp. 10.000.000	
21	Pemerintahan	Desa PasirJambu		Rp. 10.000.000	
22	Kesehatan	Desa PasirJambu		Rp. 25.000.000	
23	Pertanian	Menyeluruh Desa Pasirjambu		Rp. 250.000.000	
24	Pariwisata	Desa Ciakobandung		Rp. 200.000.000	
25	Perumahan dan Tata Ruang Kawasan Pemukiman	Menyeluruh Desa Pasirjambu		Rp. 200.000.000	
26	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Menyeluruh Desa PasirJambu		Rp. 500.000.000	
27	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rw. 01,02,05 dan 06 Desa Pasirjambu		Rp. 200.000.000	
28	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Menyeluruh Desa Pasirjambu		Rp. 200.000.000	
29	Kepemudaan dan Olahraga	Desa Pasirjambu		Rp. 25.000.000	
30	Bantuan Langsung Tunai	Desa Pasirjambu		Rp. 360.000.000	
31	Dinas Lingkungan Hidup	Menyeluruh Desa Pasirjambu		Rp. 200.000.000	
32	Lingkungan Hidup	Menyeluruh Desa PasirJambu		Rp. 100.000.000	
33	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Desa Ciramahilir		Rp. 30.000.000	
34	Peternakan	Menyeluruh Desa Ciramahilir		Rp. 250.000.000	
35	Pariwisata	Menyeluruh Desa Ciramahilir		Rp. 3.000.000.000	
36	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Cilulumpang Rw. 003 Desa Ciramahilir		Rp. 350.000.000	
37	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Ciganea Rt. 009 / 003		Rp. 3.900.000.000	
38	Pertanian	Cigadong Kp. Ciganea Rt. 008 / 003 Desa Cijati		Rp. 452.000.000	
39	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Pasir Ipis Rt. 012/005 Desa Mekargalih		Rp. 80.000.000	
40	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Pasir Ipis Rt. 012/005 Desa Mekargalih		Rp. 55.000.000	
41	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rt. 01 s/d 09 Kp. Cinangsi - Kp. Cijanggot Desa Citamiang		Rp. 1.500.000.000	
42	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Cinangsi Rt. 01 Desa Citamiang		Rp. 450.000.000	
43	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Cijanggot Rt. 07 Desa Citamiang		Rp. 650.000.000	
44	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Cinangsi Rt. 01 Desa Citamiang		Rp. 150.000.000	



No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Ket
45	Koprasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Gunungkarung		Rp. 90.000.000	
46	Pertanian dan Peternakan	Desa Gunungkarung		Rp. 250.000.000	
47	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kp. Krajan Rw. 01 s/d Kp. Bagja Rw. 06 Desa Parakanlima		Rp. 600.000.000	
48	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kp. Bunisari Rw. 08 Desa Gunungkarung		Rp. 800.000.000	
<b>Jumlah</b>				Rp. 25.049.000.000	

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN MANIIS**

##### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Memperhatikan amanat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis dan tanggap terhadap perkembangan jaman yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 5 Tahunan dan Renja Pemerintah Tahunan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.



**Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 :**

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

**Visi Pemerintah Pusat yaitu :**

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

**9 Misi Pemerintah Pusat yakni :**

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa, dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

**5 Arahan Presiden yakni :**

1. Pembangunan SDM, yaitu Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, yaitu Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, yaitu Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, yaitu Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;

5. Transformasi Ekonomi, yaitu Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

**7 Agenda Pembangunan Nasional yakni :**

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas **Polhukhankam** dan Transformasi Pelayanan Publik.

Penjabaran dari 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional tersebut diatas diantaranya yakni :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan



dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) Evolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

c) Revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
  - a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
  - d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
  - e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
  
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
  - a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
  - c) Pembangunan rendah karbon.
  
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
  - a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik



- berkualitas;
- b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
  - c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
  - d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
  - e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Rencana Strategis Kecamatan Maniis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniis setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah.

OPD Kecamatan Maniis dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di lingkungan kecamatan yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Maniis sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Maniis**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Purwakarta serta merujuk kepada Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026, maka tujuan dan sasaran pembangunan pada Penyusunan RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 mengacu kepada Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025, dimana Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu:

#### **VISI :**

"PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

#### **MISI :**

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah

Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

Misi 5 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 Maka harus dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terarah dan operasional berupa pernyataan tujuan organisasi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran atau implementasi dan pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Maka Kecamatan Maniis dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Maniis dalam rangka mewujudkan visinya untuk kurun waktu 1 (satu) dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta tahun 2024 sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Maniis tahun 2024-2026.



Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran Organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan rumusan sasaran yang ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga 3 tahun ke depan. Guna memenuhi kriteria tersebut, maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, atau disebut juga sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran. Sasaran ini akan menjadi dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu agar semua unsur yang terdapat di dalam organisasi Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta sadar akan segala sesuatu sesuai dengan yang harus dicapai.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJPD 2005-2025 maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga 3 tahun ke depan.

Berikut disajikan keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Maniis Tahun 2024–2026 yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target tahunan, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 3.1

Visi, Misi, Tujuan dan Renstra Kecamatan Maniis  
Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026

<b>VISI : "PURWAKARTA CERDAS, SEHAT DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"</b>			
<b>MISI : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Startegi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Publik Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Reformasi Birokrasi
Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkan	Pembinaan dan

Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
		Meningkatkan Sinergitas dan Soliditas dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan pembinaan dan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

### 3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pencapaian kinerja dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran yang memadai, untuk itu tentunya diperlukan suatu program aksi yang dapat menunjang organisasi dalam menilai kinerjanya. Aktifitas atau kegiatan instansi pemerintah merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang telah dibuat oleh organisasi tersebut. Aktifitas atau kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Rencana kegiatan terdiri dari strategi pokok dan konkrit untuk diimplementasikan secara maksimal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan lingkungan yang ada, baik lingkungan internal maupun eksternal.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa pengampu sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa untuk menunjang tujuan dan sasaran.

Adapun rumusan rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2024 berjumlah 6 program, 16 kegiatan dan 40 Subkegiatan yang akan dilaksanakan seperti tabel T-C. 33 berikut.



**TABEL T-C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**  
**KECAMATAN MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA**

**KECAMATAN MANIIS**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Derah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
7						<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				3.485.424.995	APBD			3.535.057.225
7	01					<b>KECAMATAN</b>			100%	3.485.424.995	APBD		100%	3.535.057.225
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah : Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Opini BB; Persentase 100%	3.378.324.995	APBD	-	Opini BB; Persentase 100%	3.429.057.225
7	01	01	2	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen yang Disusun</i>		<i>Dokumen</i>	<i>26.900.000</i>	APBD	-	<i>Dokumen</i>	<i>30.500.000</i>
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Maniis	2 Dokumen	6.000.000	APBD	-	2 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	5.500.000	APBD	-	1 Dokumen	6.000.000

7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	5.400.000	APBD	-	1 Dokumen	6.000.000
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-	1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-	1 Dokumen	3.000.000
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Maniis	1 Laporan	6.000.000	APBD	-	1 Laporan	6.500.000
7	01	01	2	02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah yang dibayar</b>		<b>Orang/Bulan</b>	<b>2.494.796.473</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>Orang/Bulan</b>	<b>2.500.857.225</b>
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maniis	17 Orang / 14 Bulan	2.489.296.473	APBD	-	17 Orang / 14 Bulan	2.494.357.225
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Maniis	1 Laporan	5.500.000	APBD	-	1 Laporan	6.500.000
7	01	01	2	03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun</b>		<b>Laporan</b>	<b>4.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>Laporan</b>	<b>5.000.000</b>
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Maniis	1 Laporan	4.000.000	APBD	-	1 Laporan	5.000.000
7	01	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas yang dibuat</b>		<b>Paket</b>	<b>25.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>Paket</b>	<b>27.000.000</b>
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Maniis	1 Paket	15.000.000	APBD	-	1 Paket	16.000.000



7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Maniis	1 Orang	10.000.000	APBD	-	1 Orang	11.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Komponen</b>		<b>Item/Pakt</b>	<b>164.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>Item/Pakt</b>	<b>178.000.000</b>
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Paket	12.000.000	APBD	-	1 Paket	17.000.000
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Paket	15.000.000	APBD	-	1 Paket	20.000.000
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Paket	10.000.000	APBD	-	1 Paket	11.000.000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Paket	107.000.000	APBD	-	1 Paket	107.000.000
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Paket	5.000.000	APBD	-	1 Paket	6.000.000
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Maniis	4 Laporan	10.000.000	APBD	-	4 Laporan	11.000.000
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Disusun	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	5.000.000	APBD	-	1 Dokumen	6.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Mebeler yang disediakan</b>		<b>Unit</b>	<b>70.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>Unit</b>	<b>76.500.000</b>
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Unit	30.000.000	APBD	-	1 Unit	30.500.000
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Maniis	9 Unit	20.000.000	APBD	-	9 Unit	23.000.000
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Maniis	3 Unit	20.000.000	APBD	-	3 Unit	23.000.000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan</b>		<b>Bulan/Laporan</b>	<b>495.628.522</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>Bulan/Laporan</b>	<b>499.200.000</b>

7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Maniis	12 Laporan	5.500.000	APBD	-	12 Laporan	6.500.000
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Maniis	12 Laporan	40.000.000	APBD	-	12 Laporan	43.000.000
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Maniis	12 Laporan	7.500.000	APBD	-	12 Laporan	8.000.000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Maniis	14 Laporan	442.628.522	APBD	-	14 Laporan	441.700.000
7	01	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit mebeul yang disediakan</b>		<b>Unit/Gedung</b>	<b>98.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>Unit/Gedung</b>	<b>102.000.000</b>
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan Maniis	9 Unit	30.000.000	APBD	-	9 Unit	30.000.000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Bangunan lainnya atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Maniis	3 Unit	18.000.000	APBD	-	3 Unit	20.000.000
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Maniis	3 Unit	50.000.000	APBD	-	3 Unit	52.000.000
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</b>		<b>Kategori : Baik</b>	<b>7.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>Kategori : Baik</b>	<b>9.000.000</b>
7	01	02	2	01		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan</b>		<b>Laporan/ Dokumen</b>	<b>3.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>	<b>Laporan/ Dokumen</b>	<b>4.000.000</b>
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Maniis	1 Laporan/ Dokumen	3.000.000	APBD	-	1 Laporan/ Dokumen	4.000.000



7	01	02	2	02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</i>		<i>Dokumen</i>	<i>4.000.000</i>	APBD	–	<i>Dokumen</i>	<i>5.000.000</i>
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maniis	1 Laporan/ Dokumen	4.000.000	APBD	–	1 Laporan/ Dokumen	5.000.000
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>37.600.000</b>	APBD	–	<b>100%</b>	<b>41.000.000</b>
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan</i>		<i>Lembaga/ Kegiatan</i>	<i>25.000.000</i>	APBD	–	<i>Lembaga/ Kegiatan</i>	<i>28.000.000</i>
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Maniis	10 Lembaga/ 1 Kegiatan	25.000.000	APBD	–	10 Lembaga/ 1 Kegiatan	28.000.000
7	01	03	2	03		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>		<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>4.600.000</i>	APBD	–	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>5.000.000</i>
7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Maniis	1 Laporan	4.600.000	APBD	–	1 Laporan	5.000.000
7	01	03	2	06		<i>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Masyarakat yang Dilaksanakan</i>		<i>Keluarga</i>	<i>8.000.000</i>	APBD	–	<i>Keluarga</i>	<i>8.000.000</i>
7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Maniis	50 Keluarga	4.000.000	APBD	–	50 Keluarga	4.000.000
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Maniis	50 Keluarga	4.000.000	APBD	–	50 Keluarga	4.000.000
7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>7.500.000</b>	APBD	–	<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>

7	01	04	2	01		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>		<i>Laporan/ Kegiatan</i>	7.500.000	APBD	–	<i>Laporan/ Kegiatan</i>	9.000.000
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maniis	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	3.000.000	APBD	–	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	4.000.000
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Maniis	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	4.500.000	APBD	–	1 <i>Laporan/ Kegiatan</i>	5.000.000
7	01	05				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan</b>		100%	25.000.000	APBD	–	100%	26.000.000
7	01	05	2	01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</i>		<i>Dokumen</i>	25.000.000	APBD	–	<i>Dokumen</i>	26.000.000
7	01	05	2	01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Maniis	100 Orang	25.000.000	APBD	–	100 Orang	26.000.000
7	01	06				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan</b>		100%	30.000.000	APBD	–	100%	31.000.000
7	01	06	2	01		<i>Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</i>	<i>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</i>		<i>Kegiatan /Dokumen</i>	30.000.000	APBD	–	<i>Kegiatan /Dokumen</i>	31.000.000
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Maniis	10 Dokumen	15.000.000	APBD	–	10 Dokumen	15.000.000
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	5.000.000	APBD	–	1 Dokumen	6.000.000



7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Maniis	1 Laporan	10.000.000	APBD	-	1 Laporan	10.000.000
---	----	----	---	----	----	--	---	------------------	-----------	------------	------	---	-----------	------------

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MANIIS**

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Maniis tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab IV ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi yang telah diuraikan pada Bab II sampai dengan Bab III tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2024 yang mengacu kepada RPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 – 2026. Mengenai penyajian Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah yang digunakan dalam Bab IV ini adalah mengacu kepada:

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Berdasarkan referensi Peraturan Perundang-Undangan diatas, maka penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Maniis Tahun 2024 telah disesuaikan dengan RPD Kab. Purwakarta dan Renstra PD Tahun 2024 – 2026, termasuk Program, Kegiatan dan Subkegiatan hasil pemutakhiran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Untuk kepentingan pencapaian visi organisasi, semua program yang terdapat di dalamnya akan diimplementasikan menjadi serangkaian kegiatan tahunan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Kerja yang memuat target dan anggaran biaya untuk setiap kegiatan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan atau operasionalisasi setiap kegiatan.



Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, kemudian akan disusun serangkaian program yang masing-masing berisikan kumpulan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Maniis. Adapun rumusan rencana program, kegiatan sub kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Maniis tahun 2024, sebagaimana pada tabel 4.1 berikut:

**TABEL 4.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MANIIS KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana						
1	2	3	4	5	6	7	8					
7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.485.424.995	APBD						
7	KECAMATAN				3.485.424.995	APBD						
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Daerah : Persentase Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		Opini BB; Persentase 100%	3.378.324.995	APBD	-					
7	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang Disusun	Dokumen	26.900.000	APBD	-		
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Maniis	2 Dokumen	6.000.000	APBD	-
7	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	5.500.000	APBD	-
7	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	5.400.000	APBD	-
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-



7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	2.000.000	APBD	-
7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Maniis	1 Laporan	6.000.000	APBD	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah yang dibayar</b>		<b>Orang/Bulan</b>	<b>2.494.796.473</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maniis	17 Orang / 14 Bulan	2.489.296.473	APBD	-
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Maniis	1 Laporan	5.500.000	<b>APBD</b>	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun</b>		<b>Laporan</b>	<b>4.000.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Maniis	1 Laporan	4.000.000	APBD	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakatan Dtnas yang dibuat</b>		<b>Paket</b>	<b>25.000.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Maniis	1 Paket	15.000.000	APBD	-
7	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Maniis	1 Orang	10.000.000	APBD	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Komponen</b>		<b>Item/Pakt</b>	<b>164.000.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Paket	12.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Paket	15.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Paket	10.000.000	APBD	-

7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Paket	107.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Paket	5.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Maniis	4 Laporan	10.000.000	APBD	-
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Disusun	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	5.000.000	APBD	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Unit Mebeler yang disediakan</b>		<b>Untt</b>	<b>70.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>
7	01	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Maniis	1 Unit	30.000.000	APBD	-
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Maniis	9 Unit	20.000.000	APBD	-
7	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Maniis	3 Unit	20.000.000	APBD	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan</b>		<b>Bulan/Laporan</b>	<b>495.628.522</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Maniis	12 Laporan	5.500.000	APBD	-
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Maniis	12 Laporan	40.000.000	APBD	-
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Maniis	12 Laporan	7.500.000	APBD	-
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Maniis	14 Laporan	442.628.522	APBD	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah unit mebeul yang disediakan</b>		<b>Unit/Gedung</b>	<b>98.000.000</b>	<b>APBD</b>	<b>-</b>
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kecamatan Maniis	9 Unit	30.000.000	APBD	-



7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Bangunan lainnya atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kecamatan Maniis	3 Unit	18.000.000	APBD	-
7	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Maniis	3 Unit	50.000.000	APBD	-
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Capaian Hasil Survey Kepuasan Masyarakat</b>		<b>Kategori : Baik</b>	<b>7.000.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	02	2	01		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Dilaksanakan</i>		<i>Laporan/ Dokumen</i>	<i>3.000.000</i>	<b>APBD</b>	-
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Maniis	1 Laporan/ Dokumen	3.000.000	APBD	-
7	01	02	2	02		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Untt Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah pelayanan publik yang dilaksanakan</i>		<i>Dokumen</i>	<i>4.000.000</i>	<b>APBD</b>	-
7	01	02	2	02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maniis	1 Laporan/ Dokumen	4.000.000	APBD	-
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>37.600.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	03	2	01		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah kegiatan yang dilaksanakan</i>		<i>Lembaga/ Kegiatan</i>	<i>25.000.000</i>	<b>APBD</b>	-
7	01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Maniis	10 Lembaga/ 1 Kegiatan	25.000.000	APBD	-
7	01	03	2	03		<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	<i>Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan</i>		<i>Laporan/ Kegiatan</i>	<i>4.600.000</i>	<b>APBD</b>	-

7	01	03	2	03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Maniis	1 Laporan	4.600.000	APBD	-
7	01	03	2	06		<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Kegiatan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Dilaksanakan</b>		<b>Keluarga</b>	<b>8.000.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	03	2	06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluargadalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Maniis	50 Keluarga	4.000.000	APBD	-
7	01	03	2	06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Maniis	50 Keluarga	4.000.000	APBD	-
7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban yang Dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>7.500.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	04	2	01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>		<b>Laporan/ Kegiatan</b>	<b>7.500.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maniis	1 <b>Laporan/ Kegiatan</b>	3.000.000	APBD	-
7	01	04	2	01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Maniis	1 <b>Laporan/ Kegiatan</b>	4.500.000	APBD	-
7	01	05				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	05	2	01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</b>		<b>Dokumen</b>	<b>25.000.000</b>	<b>APBD</b>	-



7	01	05	2	01	01	Pembinaan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Ketahanan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Maniis	100 Orang	25.000.000	APBD	-
7	01	06				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan yang Dilaksanakan</b>		<b>100%</b>	<b>30.000.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	06	2	01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan</b>		<b>Kegiatan /Dokumen</b>	<b>30.000.000</b>	<b>APBD</b>	-
7	01	06	2	01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Maniis	10 Dokumen	15.000.000	APBD	-
7	01	06	2	01	09	Fasilitasi Perencanaan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Maniis	1 Dokumen	5.000.000	APBD	-
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kecamatan Maniis	1 Laporan	10.000.000	APBD	-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Maniis Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026, dan merupakan pedoman bagi Kecamatan Maniis dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu masing-masing, yang dijabarkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun perencanaan. Penyusunan (RENJA) Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini diselaraskan dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan harmonis serta berkelanjutan sesuai dengan dokumen perencanaan.

Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan tolak ukur dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Kecamatan Maniis di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan.

Kecamatan Maniis sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Untuk mendukung hal itu, Kecamatan Maniis menyusun Rencana Kerja tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan tahun 2024.



Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Maniis yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Maniis demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Maniis telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tahun 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Untuk itu, Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat agar senantiasa bahu membahu dan terus bersinergi meningkatkan soliditas, harmonitas dan integritas dalam upaya membangun Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta sehingga pelaksanaan pembangunan Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran demi mewujudkan Masyarakat Purwakarta yang Mandiri dan Sejahtera.

Semoga Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Maniis ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar serta dapat memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak.

Purwakarta, Juni 2023

**PLT. CAMAT MANIIS**



**R. DIAN HAMDIANIHK, S.Sos, MAP**  
**NIP 19670930 200502 1 002**